

Selesaikan Asset Cukup Dengan Pokja

Pontianak, BERKAT.

Hasil Penilaian BPK-RI terhadap APBD Kalbar 2011 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini hanya dikarenakan asset yang belum terdata secara baik secara administrasi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Untuk itu Ketua DPRD Kalbar, Minsin, SH, mengatakan untuk menyelesaikan masalah asset sehingga di tahun 2012 hasil penilaian BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) cukup dengan membentuk Panitia Kerja (pokja) di internal DPRD Kalbar atau cukup Komisi A DPRD Kalbar yang membidangi masalah asset dan pemerintahan, berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini Sekda Kalbar dan Biro Keuangan dan Pengelolaan asset.

"Tidak perlu membentuk pansus asset karena kesannya politis dan permasalahan asset hanya bersifat kesalahan administrasi dan teknis," jelas Minsin, didampingi Ketua Fraksi PDIP Kalbar, M. Keping L, kemarin saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PDIP DPRD Kalbar.

Kalau membentuk pansus untuk penyelesaian asset kata Minsin, pastinya akan banyak menelan biaya. Bayangkan saja untuk 1 pansus saja akan menelan biaya mencapai Rp500 juta lebih. Biaya itu terdiri dari Rp200 juta lebih untuk digunakan studi banding, dan biaya konsultasi anggota (uang perjalanan dinas) Rp15 juta perorang yang setiap pansus terdiri dari 23 orang anggota dewan.

Namun tidak mustahil kalau benar-benar memang urgen dan mendesak dibentuk pansus ya, dibentuk pansus karena uang negara dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dengan tata cara yang benar.

"Makanya janganlah berorientasi kepada perjalanan dinas kalau membentuk pansus, lebih baik dana tersebut untuk



M. KEBING L

membantu infrastruktur kabupaten dan kota di Kalbar," harap Minsin, yang

didampingi Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Thomas Aleksander, S.Sos, Bendahara, Tapanus, SH.MH, anggota, M. Syafrani, SH, M.Jimmi, Haritus, Krisantus Kurniawan, S.Ip,MSi, Martinus Sudarno, SH.

Ia mengharapkan Sekda Kalbar beserta jajaran secepatnya melakukan perbaikan dan pembenahan asset, sesuai dengan apa yang disarankan BPK-RI. BPK-RI saja dalam LHP banyak memuji apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar artinya banyak kemajuan dan trobosan dari Gubernur Kalbar seperti APBD yang tahun lalu Rp1,8 triliun menjadi jadi Rp2 triliun lebih dan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan.

"Disisi lain kita DPRD Kalbar juga ikut

mendongkrak keberhasilan pemerintah karena juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan," paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Keping L, asset yang belum terdata baik secara administrasi yang membuat penilaian BPK WDP, untuk itu cukup dengan membentuk Pokja dengan kerjasama antar lembaga DPRD Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Keping menambahkan, berkaitan dengan pansus di dalam menindaklanjuti LHP BPK, di tatib juga diatur DPRD boleh membentuk Panja. Panja ini dibentuk DPRD untuk mengawasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah

LANJUTAN BACA HAL 11

Selesaikan Asset Cukupdari Hal 24

dalam hal penyelesaian aset yang tercatat di dalam LHP. Bab 9 pasal 126 ayat (8). Makannya dari dulu fraksi PDIP tidak berkeinginan adanya Pansus.

Lagipula, ungkap Keping Pansus itu dibentuk karena ada sesuatu yang luar biasa, sebagai contoh ada kesalahan gubernur dan ada tindakan gubernur yang merugikan publik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Tadi kita sudah dengar dari BPK, yang ada dalam catatan BPK itu hanya kesalahan teknis dan administrasi saja,"

jelasan. Barangnya ada, artinya penataan administrasinya saja yang perlu dibenahi. Misalkan ini asset pemerintah provinsi tapi dikuasai pemerintah kabupaten. Atau ada yang sudah menjadi milik pemerintah provinsi tapi masih dikuasai orang per orang. Ini masih ranahnya SKPD, dan BPN untuk menyelesaikannya. Seperti yang disampaikan BPK.

Itu murni tugasnya Sekda, dan minta kepada Pimpinan DPRD untuk memanggil Sekda guna menyelesaikan persoalan asset ini. (aca)